

## RINGKASAN EKSEKUTIF

**Pencurian aset negara dari negara-negara berkembang merupakan masalah yang besar dan serius:**

- Arus lintas-batas penghasilan global dari kegiatan pidana, korupsi dan penghindaran pajak diperkirakan bernilai antara \$1 triliun dan \$1.6 triliun per tahunnya.
- Uang korupsi terkait penyuaipan diterima pejabat pemerintah negara-negara berkembang dan transisi diperkirakan senilai \$20 milyar hingga \$40 milyar per tahunnya – sebuah angka yang setara dengan 20 hingga 40 persen dari arus bantuan pembangunan resmi (ODA).

**Perkiraan demikian, walaupun tidak terlalu tepat, memberi sebuah bayangan betapa besar masalahnya serta perlu adanya tindakan bersama untuk menanganinya.** Pemberlakuan tonggak-tonggak Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) pada tahun 2005, di mana satu bab secara khusus menjabarkan mengenai penarikan kembali aset, menandakan meluasnya mufakat global untuk melakukan tindakan tegas.

**Nilai aset yang dicuri oleh pemimpin-pemimpin korup pada tingkat negara seringkali menakjubkan.** Dampak korupsi itu sendiri jauh melampaui nilai aset yang dicuri oleh para pemimpin negara. Ini mencakup degradasi lembaga-lembaga umum, terutama yang terlibat dalam pengelolaan keuangan publik dan tata kelola sektor keuangan, melemahnya dan bahkan hancurnya iklim penanaman modal swasta, dan korupsi terhadap mekanisme penyampaian layanan sosial untuk program-program kesehatan dan pendidikan dasar, dengan dampak yang sangat buruk bagi orang miskin. "Kerugian kolateral" demikian, terkait dengan pertumbuhan dan kemiskinan yang niscaya berkurang, akan proporsional dengan masa kepemimpinan pemimpin yang korup tersebut.

**Secara tradisional fokus komunitas pembangunan internasional adalah untuk menangani korupsi dan tata kelola yang buruk di negara-negara berkembang itu sendiri, pendekatan demikian mengabaikan "sisi lain dari persamaan tersebut":** aset curian seringkali disembunyikan di pusat-pusat keuangan negara-negara maju; suap yang diberikan kepada pejabat pemerintah di negara berkembang seringkali berasal dari badan korporasi multinasional; dan layanan perantara yang disediakan oleh pengacara, akuntan dan agen pembentukan perusahaan, yang dapat digunakan untuk pencucian atau penyembunyian hasil pencurian aset oleh pemimpin negara berkembang, seringkali bertempat di pusat-pusat keuangan negara maju.

**Menghadapi masalah pencurian aset merupakan tantangan yang sangat besar.** Meskipun negara-negara yang berbeda-beda seperti Nigeria, Peru dan Filipina telah menikmati beberapa keberhasilan dalam penarikan kembali aset, prosesnya sangat makan waktu dan biaya.

- Secara umum, dari pengalaman negara-negara tersebut, negara berkembanglah yang diperkirakan akan menemui kendala berat dalam penarikan kembali aset curian.
- Meskipun ada kemauan politis untuk mengejar aset curian, kapasitas hukum, penyelidikan dan yudisial yang terbatas serta sumber daya keuangan yang tidak memadai dapat menghambat prosesnya.
- Yurisdiksi di mana aset curian disembunyikan, seringkali di negara maju, mungkin tidak tanggap terhadap permintaan akan bantuan hukum.

**Prakarsa Penarikan Kembali Aset Curian (StAR – Stolen Asset Recovery) sedang diluncurkan bersama oleh Kantor PBB yang menangani Narkotik dan Tindak Pidana (UNODC) dan Kelompok Bank Dunia (WBG) untuk menghadapi masalah ini.** Oleh karena sifat masalahnya, keberhasilan akan sangat bergantung pada pembentukan dan penguatan kemitraan antara negara-negara maju dan berkembang, serta juga badan-badan bilateral dan multilateral lainnya yang memiliki kepentingan dalam masalah tersebut.

**Perkembangan hasil prakarsa StAR diharapkan cukup signifikan adanya.** Sebagian saja dari aset yang ditarik kembali dapat menyediakan pendanaan yang sangat dibutuhkan untuk program sosial atau infrastruktur yang sangat diperlukan. Setiap \$100 juta yang dapat ditarik kembali dapat mendanai imunisasi lengkap bagi 4 juta anak atau menyediakan saluran air bagi sekitar 250.000 rumah tangga. Manfaat seluruhnya akan jauh melampaui yang dikaitkan dengan restitusi aset itu sendiri, dengan asumsi bahwa dana yang dikeluarkan dibelanjakan dengan baik. Pertama, sebuah program StAR yang memberikan signal bahwa tidak ada tempat perlindungan bagi aset pencurian akan membawa dampak pencegahan yang kuat. Kedua, dalam jangka panjang, dapat diharapkan adanya manfaat yang signifikan dan berkelanjutan, dengan asumsi bahwa upaya penarikan kembali aset diikuti oleh reformasi kelembagaan dan tata kelola yang lebih baik. Memang, tanpa peningkatan dalam tata kelola, sebuah prakarsa StAR tidak akan menghasilkan manfaat yang bertahan lama.

**Prakarsa StAR UNODC-WBG merupakan bagian integral dari Strategi Anti-Korupsi dan Tata Kelola Kelompok Bank Dunia yang telah disetujui, yang mengakui perlu adanya bantuan yang diberikan pada negara-negara berkembang untuk menarik kembali aset yang telah dicuri. Kerangka kerja hukum internasional yang mendasari StAR disediakan oleh Konvensi Anti-Korupsi PBB, perjanjian anti-korupsi global yang pertama yang diberlakukan dalam bulan Desember 2005. UNODC merupakan pengawas dan badan utama pendukung pelaksanaan UNCAC, serta juga merupakan Sekretariat Konperensi Pihak-Pihak Negara.**

**Rencana Tindak yang disajikan dalam laporan ini merupakan tanggapan terhadap umpan balik yang diterima dari konsultasi dengan negara-negara maju dan berkembang, serta juga dari pelajaran yang diperoleh dari pengalaman Nigeria, Peru dan Filipina:**

- Pencurian aset negara dimudahkan oleh kurang adanya transparansi dan akuntabilitas umum.
- Negara-negara berkembang perlu memperkuat sistem hukum, finansial dan sistem pengelolaan keuangan publik.
- Meskipun ada kemauan politis dalam negara-negara korban, perbedaan hukum lintas yurisdiksi atau keengganan negara-negara maju untuk membantu dapat menggagalkan pengembalian aset.

**Sebuah asumsi dasar dari Rencana Tindak adalah bahwa sebuah upaya yang berhasil atas penarikan kembali aset curian memerlukan tindakan global:**

- Kemauan politis dan reformasi hukum juga dibutuhkan oleh negara-negara maju, tidak hanya oleh negara-negara berkembang. Keduanya perlu meratifikasi dan melaksanakan Konvensi Anti-Korupsi PBB (UNCAC).
- Waktu adalah sangat penting di sini. Memperpanjang proses penarikan kembali aset akan mempengaruhi kredibilitas negara korban. Tanggapan yang segera diperlukan dari negara-negara di mana aset curian disembunyikan.
- Kerjasama global diperlukan untuk memastikan bahwa tempat perlindungan finansial baru tidak menggantikan yang ada saat ini dan negara-negara berkembang memperoleh dukungan hukum yang mereka perlukan.

**Contoh-contoh tindakan yang diusulkan mencakup:**

- Pelaksanaan UNCAC, termasuk pengembangan dan penguatan kemitraan dengan badan multilateral dan bilateral dalam menjalankan upaya tersebut.
- Pengembangan sebuah program uji coba yang bertujuan untuk membantu negara-negara untuk pengembalian simpanan aset curian dengan menyediakan bantuan hukum dan teknis yang diperlukan. Ini dapat mencakup bantuan pengajuan permintaan untuk kesepakatan bantuan hukum dan nasehat mengenai para ahli yang dibutuhkan. **Baik WBG maupun UNODC tidak akan terlibat secara langsung dalam investigasi, penelusuran, penegakan hukum, penuntutan, penyitaan dan pemulangan aset-aktiva yang dicuri kembali ke negara asal yang**

**lebih sesuai untuk bantuan antar pemerintah atau bantuan sektor swasta, bekerjasama dengan badan berwenang pemerintah yang terkait.**

- Penawaran alternatif kepada negara-negara untuk pemantauan aset yang telah dipulangkan, dengan kerangka kerja keseluruhan yang mencakup reformasi pengelolaan finansial umum, untuk memastikan adanya transparansi dan penggunaan yang efektif atas aset-aset tersebut. Pemantauan demikian adalah atas basis sukarela, dengan persetujuan dari semua negara terkait, sesuai dengan prinsip dasar pengembalian aset curian sebagai yang terkandung dalam UNCAC.
- Pengembangan kemitraan global berkaitan dengan StAR.

**Pada Rapat Musim Semi IMF-Bank Dunia Tahun 2007, dalam sebuah acara selingan yang memperkenalkan prakarsa StAR, perwakilan dari negara-negara maju dan berkembang serta bank pembangunan multilateral, menyatakan dukungan yang kuat terhadap prakarsa tersebut.** Konsensusnya adalah bahwa StAR merupakan sebuah gagasan yang muncul tepat pada waktunya dan bahwa setiap negara atau badan internasional wajib melakukan perannya agar prakarsa tersebut dapat berhasil. Memang, sebuah upaya global bersama adalah penting bagi kesuksesan dan secara tegas menyampaikan peringatan bahwa korupsi tidak ada gunanya. Dalam pengertian ini, StAR diuraikan sebagai "mata rantai yang hilang" dalam sebuah upaya anti-korupsi yang efektif. Dengan memberikan signal kepada pemimpin-pemimpin yang korup bahwa aset curian akan ditelusuri, diambil-alih, disita dan dikembalikan ke negara asalnya, StAR akan merupakan penghadang yang tidak mudah dikalahkan dalam perang melawan korupsi. Bekerjasama erat dalam kemitraan dengan komunitas pembangunan internasional, UNODC dan WBG berharap akan membuat perbedaan yang positif bagi negara-negara berkembang melalui prakarsa StAR.

## SEBUAH RENCANA TINDAK

Konsultasi awal dengan pejabat-pejabat tinggi dalam kementerian keuangan dan pembangunan dari negara-negara berkembang, termasuk G-8, telah menunjukkan dukungan kuat bagi prakarsa StAR. Negara-negara dari Afrika telah khawatir mengenai restitusi aset curian paling tidak sejak 1999, ketika pidato Presiden Obasanjo dari Nigeria di Rapat Umum PBB menyampaikan pula permohonan adanya konvensi internasional untuk pemulangan kembali harta Afrika yang diambil secara tidak sah dan disimpan di luar negeri<sup>1</sup>. Di rapat Musim Semi IMF-Bank Dunia tahun 2007, dalam sebuah acara selingan untuk memperkenalkan prakarsa StAR, perwakilan dari negara-negara maju dan berkembang serta bank pembangunan multilateral yang hadir di sana secara sepakat menyatakan dukungan terhadap prakarsa tersebut. Konsensusnya adalah bahwa StAR merupakan sebuah gagasan yang waktunya sudah tiba dan bahwa setiap negara atau badan internasional wajib berperan dalam memastikan keberhasilannya; memang, sebuah upaya bersama secara global adalah penting bagi keberhasilan dan secara tegas mengirimkan sinyal bahwa korupsi tidak akan berguna. Dalam pengertian ini, StAR dijabarkan sebagai "mata rantai yang hilang" dalam sebuah upaya anti-korupsi yang efektif. Dengan menyadarkan para pemimpin yang korup bahwa aset curian akan ditelusuri, dirampas, disita dan dikembalikan ke negara korban, StAR akan merupakan sebuah penghadang kuat terhadap korupsi.

Rencana Tindak yang selanjutnya akan disajikan mencerminkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan mengenai bahan yang esensial bagi sebuah upaya yang berhasil, yang secara luas tumpang tindih dengan wawasan dan tantangan yang timbul dari studi kasus negara yang disajikan di atas:

- Kemauan politis, reformasi hukum dan peningkatan kapasitas berinvestasi dibutuhkan dalam negara-negara maju, tidak hanya dalam negara-negara *berkembang*. Negara-negara maju harus memandang penarikan kembali aset curian sebagai sebuah masalah pembangunan (karena merupakan sebuah tanda anti-korupsi serta juga menyediakan suatu sumber dana pembangunan).
- Waktu adalah sangat penting. Untuk sebagian besar negara berkembang, memperpanjang proses pengembalian aset akan berpengaruh pada kredibilitas dan memberi para kleptokrat sebuah alasan untuk menyatakan mereka adalah korban. Sebuah tanggapan yang segera dan proaktif diperlukan dari negara-negara di mana aset curian disembunyikan.
- Sebuah kemitraan global harus dibentuk guna memastikan bahwa tempat perlindungan keuangan yang baru tidak menggantikan yang ada sekarang dan bahwa negara-negara berkembang menerima dukungan hukum yang diperlukan.
- Masyarakat sipil dan media di negara-negara berkembang patut dibawa serta ke dalam proses pemantauan penggunaan aset-aset yang berhasil ditarik kembali, di mana memungkinkan.

## MATRIKS RENCANA TINDAK

Pada tingkat yang paling sederhana, ada dua cara untuk membantu negara-negara berkembang untuk menarik kembali aset-aset curian. Salah satu adalah untuk mengurangi kendala yang dihadapinya ketika berupaya untuk menarik kembali aset yang terdapat di yurisdiksi berbeda. Kedua adalah untuk memperkuat undang-undang dan lembaga-lembaga yang mengurus penarikan kembali aset dalam negara-negara tersebut. Dengan demikian tindakan dapat dikelompokkan berdasarkan dua tujuan: mengurangi kendala dalam negara-negara maju untuk penarikan kembali aset curian; serta memperkuat kemampuan negara-negara berkembang

untuk menarik kembali aset-aset tersebut. Sebagai tambahan, untuk memastikan adanya transparansi, pemantauan penggunaan aset-aset yang berhasil ditarik kembali atas dasar sukarela, dengan kesepakatan dari semua negara yang terkait, kemungkinan besar akan diperlukan. Tabel 3 menyajikan sebuah matriks mengenai tindakan relevan yang direkomendasikan berdasarkan dua tujuan tersebut yang dapat diambil oleh negara-negara maju (G-9 dan OECD) dan negara-negara berkembang, pemangku kepentingan lainnya, serta UNODC dan WBG. Matriks tersebut mencerminkan umpan balik dari berbagai konsultasi dan tantangan yang timbul dari studi kasus negara yang disebutkan di atas.

Butir-butir berikut cukup berharga untuk diperhatikan mengenai Rencana Tindak: pertama, sebuah upaya StAR yang berhasil memerlukan G-8 dan OECD untuk memimpin dengan cara memberi contoh, yang mencakup ratifikasi UNCAC oleh negara-negara yang belum melakukannya dan secara aktif memudahkan pemenuhan permintaan untuk kesepakatan bantuan hukum dari negara-negara berkembang mengenai penarikan kembali aset curian. Kedua, dengan kedudukan UNCAC sebagai kerangka kerja hukum internasional yang canggih yang fokus pada pengembalian aset (lihat bagian 4), ratifikasi dan pelaksanaan UNCAC oleh semua negara diberi prioritas khusus. Ketiga, sangat perlu adanya tindakan secara global dan bersama oleh semua negara dan badan-badan terkait dengan mengikutsertakan sebuah peran bagi para regulator sistem finansial dan sektor non-finansial. Keempat, baris akhir pada tabel menekankan pada tindakan bersama oleh UNODC dan WBG, yang terbagi dalam tiga bagian: bantuan bagi upaya masing-masing negara; menggunakan wewenang mengadakan rapat untuk menyarankan penarikan kembali aset curian; serta mensponsori sebuah forum untuk berbagi pengalaman antara negara-negara berkembang dalam penarikan kembali aset curian.

Sebagai tambahan atas apa yang disajikan dalam tabel, ada beberapa badan multilateral dan bilateral yang sudah memainkan peran penting baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penarikan kembali aset curian. Bagian berikut akan membahas tindakan khusus yang perlu dilaksanakan oleh UNODC dan WBG untuk mengambil manfaat dari pekerjaan dan keahlian badan-badan demikian, termasuk secara aktif melibatkan mereka dalam upaya ini. Bagian berikut juga membahas tindakan khusus – seperti pemantauan atas penggunaan dana yang berhasil ditarik kembali – yang dapat mengambil manfaat perbandingan dari salah satu lembaga berikut: WBG, khususnya dalam hal ini.

TABEL 3. **MATRIKS RENCANA TINDAK**

	<b>Mengurangi Kendala di Negara-Negara Maju</b>	<b>Memperkuat Kapasitas Negara-Negara Berkembang</b>
G-8 dan OECD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memimpin dengan memberi contoh yang baik serta memegang peran advokasi yang kuat dalam arena global</li> <li>▪ Meratifikasi dan melaksanakan UNCAC</li> <li>▪ Memantau kemajuan atas Deklarasi Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri G-8 2004 mengenai penarikan kembali hasil korupsi</li> <li>▪ Secara pro-aktif membantu negara berkembang dalam penarikan kembali aset pencurian dalam bentuk apapun (termasuk rekening bank, saham dan real estate)</li> <li>▪ Mematuhi rekomendasi FATF, khususnya mengenai individu yang terungkap secara politis (PEPS) dan norma-norma Kenali Pelanggan Anda (KYC)</li> <li>▪ Memberi tekanan pada negara-negara dengan pasar yang sedang maju yang digunakan sebagai tempat perlindungan bagi aset curian untuk meratifikasi dan melaksanakan UNCAC</li> <li>▪ Mempertimbangkan penganutan tindakan penyitaan tanpa putusan, pemberlakuan putusan penyitaan asing dan mekanisme efektif lainnya guna membantu dalam penarikan kembali aset.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendanai program atau secara langsung menyediakan negara berkembang bantuan teknis yang akan meningkatkan kapasitas sistem peradilan pidana – pemberlakuan hukum, badan wewenang penuntutan dan yudisial – untuk secara efektif mencegah penjarahan aset dan menarik kembali hasil korupsi sesuai dengan standar hukum yang diterima secara internasional.</li> </ul>
Negara-Negara Berkembang		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan ratifikasi dan pelaksanaan lengkap atas UNCAC</li> <li>▪ Mendanai, menempatkan pekerja dan memastikan kemandirian Unit Intelijens Keuangan (FIU)</li> <li>▪ Mematuhi semua rekomendasi FATF terutama yang berkaitan dengan individu-individu yang terungkap secara politis (PEPs) dan norma-norma Kenali Pelanggan Anda (KYC)</li> <li>▪ Memperkokoh FIU serta kapasitas untuk mencegah pencucian uang</li> <li>▪ Mengembangkan kapasitas untuk menanggapi dan mengajukan permohonan untuk bantuan hukum bersama secara internasional</li> <li>▪ Menganut dan melaksanakan tindak penyitaan yang efektif, termasuk legislasi penyitaan tanpa dasar putusan</li> <li>▪ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan finansial umum (PFM)</li> <li>▪ Menciptakan dan memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi nasional</li> </ul>
Lembaga regulasi sistem keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memberlakukan sanksi terhadap lembaga keuangan yang menjalin usaha dengan individu-individu yang korup dan PEPs tanpa uji tuntas</li> <li>▪ Mematuhi rekomendasi FATF 40+9</li> <li>▪ Membentuk garis-garis petunjuk yang jelas</li> </ul>	

	<p>mengenai perlakuan terhadap PEPs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat rezim anti pencucian uang dengan memberlakukan persyaratan KYC, pendataan dan pelaporan, terutama yang berkaitan dengan PEPs.</li> </ul>	
Sektor Swasta dan NGO yang Non-Finansial		<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan pelatihan bagi unit-unit khusus di negara-negara berkembang berkaitan dengan penarikan kembali aset</li> <li>Mengikutsertakan masyarakat sipil dan media untuk membantu melakukan pemantauan terhadap penggunaan aset-aset yang berhasil ditarik kembali.</li> </ul>

#### UNODC dan Kelompok Bank Dunia

- Membentuk kelompok *Friends of StAR* yang terdiri atas para individu yang berpengaruh dari negara-negara maju dan berkembang untuk memantau kemajuan serta memberi nasehat sehubungan dengan prakarsa StAR.
- Mensponsori forum untuk berbagi pengalaman dunia dalam penarikan kembali aset curian.
- Menyediakan bantuan teknis kepada lima sampai enam negara berkembang mengenai pelaksanaan UNCAC.
- Mendorong negara-negara penerima untuk mengikutsertakan masyarakat sipil dan media dalam pemantauan.

## PROGRAM BERSAMA UNODC-WBG

UNODC dan WBG sedang bekerja untuk membentuk suatu upaya bersama dalam penarikan kembali aset curian dalam kerangka kerja tindakan bersama secara global yang digambarkan dalam matriks tersebut di atas. Peran WBG akan ditetapkan oleh mandatnya berdasarkan strategi Tata Kelola dan Anti-Korupsi yang disepakati oleh Dewan dalam bulan Maret 2007. Begitu juga, peran UNODC akan ditetapkan oleh penunjukannya sebagai pengawas UNCAC dan Sekretariat Pihak-Pihak Negara UNCAC. UNODC dan WBG tidak akan terlibat secara langsung dalam investigasi, penelusuran, pemberlakuan hukum, penuntutan, penyitaan dan pemulangan aset curian: pengalaman negara-negara seperti Nigeria menganjurkan bahwa kegiatan-kegiatan demikian lebih sesuai bagi bantuan antar pemerintah atau bantuan sektor swasta, bekerja sama dengan badan wewenang pemerintah yang terkait.

Pembahasan di bawah ini menelaah secara lebih rinci lagi tiga perangkat tindakan penting dari matriks tersebut di atas: membangun kemitraan global berkaitan dengan StAR; membangun kapasitas kelembagaan pada tingkat negara; dan pelaksanaan dan pemantauan UNCAC.

### 6.2a Membangun Kemitraan Global berkaitan dengan StAR

UNODC dan WBG telah mendirikan sebuah kelompok kerja bersama untuk melaksanakan prakarsa StAR. Maksud yang penting adalah untuk mengikutsertakan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan dalam penarikan kembali aset; sebuah upaya global bersama sangat penting bagi keberhasilan. Apendiks B secara singkat menguraikan apa yang dilakukan oleh badan-badan resmi multi-negara lainnya dalam hal ini. Sebuah tindakan segera yang dapat dilakukan dalam rangka ini adalah untuk mengadakan rapat para ahli penyitaan dan penarikan kembali aset, bersama dengan para perwakilan dari negara-negara berkembang yang diseleksi, untuk berbagi pengalaman serta mengenali praktek-praktek yang baik yang dapat diberbagikan secara lebih luas lagi.

Kemitraan yang lebih luas lagi akan diperlukan untuk melaksanakan permintaan internasional secara terkoordinasi untuk membekukan aset sehubungan dengan Individu yang Terungkap secara Politis (PEP) tertentu. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara-negara

berkembang adalah agar negara lainnya bersedia untuk membekukan aset curian. Permintaan demikian lazimnya diajukan sebelum investigasi pidana atau sipil diprakarsai, seringkali tanpa mengetahui informasi transaksi rekening bank dan terkadang pada waktu pejabat pemerintah yang bersangkutan masih dilindungi oleh suatu bentuk imunitas dalam negeri. Masalahnya adalah bahwa PEP dapat dengan mudah memindahkan dana dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya untuk menghindari deteksi dan pembekuan. UNODC dan WBG, dalam kemitraan dengan badan-badan dan pemerintah masing-masing, dapat berupaya untuk mendirikan sebuah metodologi permintaan yang seragam bagi pemerintah korban untuk digunakan dalam mengajukan permintaan secara internasional dan sekaligus untuk bantuan dalam pembekuan aset curian.

Prakarsa yang berkaitan melibatkan pembentukan Daftar Titik Fokus StAR, untuk membantu mengirimkan kepada negara-negara siapa yang harus dihubungi di negara-negara penerima untuk bantuan segera dalam hal adanya suatu keadaan darurat. Kecepatan komunikasi elektronik (termasuk pemindahan dana lewat kabel) dan mudahnya kerusakan yang terjadi terhadap bukti memerlukan bantuan saat itu juga (real-time). G-8 dan lainnya telah mendirikan sistem kontak 24-jam untuk menangani terorisme, tindak pidana melalui komputer, dan hal-hal lainnya. Tidak ada daftar atau sistem untuk menghubungi pejabat nasional yang ditunjuk yang dapat bertindak sebagai Titik Fokus untuk membantu negara-negara menangani kasus aset curian, terutama yang melibatkan PEP, pejabat pemerintah lainnya, dan yang berkemungkinan telah menyuap pejabat pemerintah. UNODC dan WBG dapat bekerjasama dengan lembaga lainnya untuk mewujudkan Daftar Titik Fokus para pejabat yang berlaku 24-jam, tujuh hari seminggu, di negara-negara yang dapat menanggapi permintaan darurat untuk bantuan. Apendiks C memuat konsep kuesioner yang dapat digunakan untuk membantu dalam mengenali titik-titik fokus serta informasi yang diperlukan untuk memberikan tanggapan. Titik-Titik Fokus StAR dapat berguna sebagai saluran bagi permintaan pembekuan PEP internasional.

Prakarsa lainnya berkaitan dengan pendirian Kelompok Kawan StAR (FSTAR). Kerjasama komunitas internasional diperlukan untuk memastikan bahwa pusat-pusat keuangan memenuhi tingkat minimum tertentu berkaitan dengan transparansi dan bersepakat untuk bekerjasama dengan badan berwenang penegak hukum dari yurisdiksi lainnya. FSTAR akan merupakan kelompok penasehat terdiri atas individu-individu yang terhormat dan berpengaruh dari negara-negara yang memiliki kepentingan atau keahlian khusus dalam penarikan kembali aset curian, dengan kerangka acuan sebagai berikut:

- Melayani sebagai sebuah forum untuk memahami masalah yang dihadapi negara-negara dalam hal penyitaan, penarikan kembali aset, dan kerjasama internasional dalam anti pencucian uang dan penarikan kembali aset curian, serta mengembangkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah-masalah demikian.
- Mengadakan advokasi untuk ratifikasi dan pelaksanaan UNCAC, terutama dalam negara-negara maju (penerima).

## **6.2b Membangun Kapasitas Kelembagaan dan Menyediakan Bantuan Teknis pada Tingkat Negara**

Pertama, pada tingkat negara secara masing-masing, upaya UNODC-WBG akan mengikuti pendekatan dua-jalur yang terdiri atas tindakan segera singkat dan intervensi pembangunan lembaga yang memakan waktu lebih lama. Menetapkan apa yang diperlukan akan bergantung pada konteks negara khususnya serta dimensi masalah aset curian. Tindakan yang segera dapat dilakukan paling tidak akan mencakup bantuan teknis kepada negara mengenai pengajuan permintaan untuk kesepakatan bantuan hukum, bagaimana caranya mendekati negara-negara penerima, dan memberi nasehat atas kontrak dengan penasehat hukum dan akuntan forensik yang bekerja dengan lembaga wewenang negara yang terkait.

UNODC dan WBG akan mengenali lima sampai enam negara untuk menerima bantuan teknis mengenai pelaksanaan UNCAC dan meningkatkan kapasitas sistem peradilan pidana untuk secara efektif mencegah penjarahan aset dan menangani penarikan kembali aset secara konsisten dengan standar hukum yang diakui secara internasional. Bantuan teknis ini juga akan bersasaran tindakan yang direkomendasikan bagi negara-negara berkembang di tabel 3:

- Mengadakan ratifikasi dan pelaksanaan UNCAC secara lengkap (lihat halaman 37)
- Mendanai, menempatkan pekerja dan memastikan kemandirian Unit-Unit Intelijens Keuangan (FIU)
- Memperkuat FIU dan kapasitas anti-pencucian uang
- Mengembangkan kapasitas untuk menanggapi serta mengajukan permintaan kesepakatan bantuan hukum internasional
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengelolaan finansial umum
- Menciptakan dan memperkuat badan-badan anti-korupsi dalam negeri

Pertama, manfaat yang bertahan lama dari sebuah program StAR – termasuk memastikan bahwa aset-aset yang berhasil dikembalikan digunakan dengan baik – memerlukan negara-negara berkembang untuk memperkokoh lembaga-lembaga umum serta mempromosikan pengecekan dan perimbangan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi umum. Khususnya, fokus perlu diadakan terhadap pengelolaan keuangan umum dan tata kelola sektor keuangan. Saat ini ada beberapa upaya yang sedang berjalan mengenai hal demikian atas mana upaya StAR dapat turut serta, seperti Platform GAC WBG. Tata kelola sektor keuangan merupakan hal yang menarik perhatian secara khusus. Ini mencakup memperkokoh unit intelijens Keuangan (FIU) dan lembaga lainnya yang menangani Anti Pencucian Uang dan Memerangi Pendanaan Terorisme (AML/CFT). Department Integritas Pasar Keuangan Kelompok Bank Dunia, FPDFI, saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas transparansi dalam sektor keuangan, terutama unit intelijens keuangan, serta menjelajahi pertukaran bebas keahlian dan informasi antar Badan-Badan Anti-Korupsi dan badan wewenang Anti Pencucian Uang. Pekerjaan ini sedang dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya.

Ketiga, tindakan sedang dijelajahi untuk memudahkan negara-negara dalam penarikan kembali aset curian seperti:

- Mengenali komponen-komponen sebuah program pelatihan investigasi keuangan yang standar untuk memerangi pencucian uang dan membantu penarikan kembali aset
- Mengembangkan sebuah pola investigasi bagi pejabat pemerintah untuk diikuti dalam keadaan darurat yang perlu ditanggapi segera
- Mengembangkan sebuah jaringan internasional 24-jam kontak Titik Fokus StAR dalam huruf besar, yang dapat menanggapi permintaan darurat untuk bantuan hukum, sebagaimana dibahas di atas.

Keempat, sekali aset-aset telah dipulangkan, WBG menawarkan jasanya untuk membantu dalam memantau penggunaan dana demikian, berdasarkan pengalamannya dalam sistem penelusuran pengeluaran dana. Keterlibatan demikian dalam pemantauan akan sepenuhnya sukarela, sesuai dengan prinsip dasar pengembalian aset curian sebagaimana dinyatakan dalam UNCAC. Dapat dipastikan bahwa WBG memiliki kelebihan dalam pemantauan demikian. Dalam rangka UNCAC, WBG dapat menawarkan seperangkat alternatif kepada negara-negara yang bersedia untuk mengikuti pemantauan aset yang dikembalikan sehubungan dengan reformasi luas terhadap sistem pengelolaan finansial umumnya (PFM). Berdasarkan pengalaman yang terakumulasi dengan negara-negara, sasaran secara keseluruhan seharusnya adalah untuk melanjutkan penguatan sistem PFM negara secara langsung, baik sebaik tindak pencegahan terhadap pencurian aset maupun sebagai jaminan bahwa sumber daya tambahan dari sumber manapun (termasuk pengembalian aset) digunakan dengan baik. Pelajaran diperoleh dari reformasi

pengelolaan keuangan umum yang berhasil dan berkelanjutan menggaris-bawahi kepemilikan negara dan sebuah pendekatan yang selaras dan terkoordinasi terhadap reformasi.” Keterlibatan pihak donor lainnya sangat penting dalam proses ini. Bahkan, pengalaman Nigeria dan Filipina merupakan kasus yang kuat dasarnya untuk melibatkan masyarakat sipil dan media dalam pemantauan penggunaan aset curian yang berhasil ditarik kembali, di mana memungkinkan.

### **6.2.c Pelaksanaan dan Pemantauan UNCAC**

Sebagaimana disebutkan di atas UNODC merupakan pengawas dan badan pemimpin pelaksanaan bagi UNCAC. Tindakan yang sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari kemitraan UNODC-WBG dalam hal pelaksanaan UNCAC adalah sebagai berikut:

- Bantuan WBG dalam Konferensi Pihak Negara 2007 di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah
- Partisipasi WBG dalam kelompok kerja UNODC/UNCAC mengenai bantuan teknis, pelaksanaan dan penarikan kembali aset.
- Bantuan teknis bersama UNODC dan WBG berkaitan dengan kerangka kerja hukum dalam negeri untuk konsistensi dengan UNCAC.